



BPNT Januari-Februari Rampung Akhir Bulan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta menargetkan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Yogyakarta untuk periode Januari-Februari rampung dalam empat tahap atau selesai hingga akhir bulan ini. Sedangkan untuk penyaluran BPNT periode Maret, akan dilakukan setelah seluruh penyaluran BPNT periode Januari-Februari selesai dilakukan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Irianto Edi Purnomo menjelaskan, ada 7.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di Kota Yogyakarta. BPNT bisa dicairkan di 130 rumah pangan kita

(RPK).
 "Untuk penerima bantuan pangan tahap keempat di antaranya ditujukan untuk peserta program keluarga harapan (PKH)," jelasnya, belum lama ini. Dia menyebutkan, untuk tahap keempat ada sekitar 1.500 data peserta program PKH yang harus dicocokkan karena peserta sudah memiliki kartu lama dan kemudian menerima kartu baru untuk mencairkan BPNT.

"Penyaluran bantuan dilakukan di tahap terakhir karena ada validasi data terlebih dahulu. Saat mencairkan bantuan,

BPNT Januari-Februari
 • Sambungan Hal 13

penerima diminta menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai verifikasi data sehingga bantuan diterima oleh penerima yang berhak," urainya.

Dia menyebut, BPNT adalah program baru, sehingga dimungkinkan ada beberapa hambatan saat penyalurannya. Namun, bantuan ini akan lebih tepat sasaran dibanding bantuan dalam bentuk beras untuk masyarakat miskin (raskin) meskipun penyalurannya bisa dilakukan rutin tiap bulan.

Adapun pencairan BPNT periode Januari-Februari tahap ketiga tersebut sudah dilayani sejak Jumat (9/6) hingga Kamis (15/6). Setiap penerima bantuan akan memperoleh 20 kilogram beras kualitas medium dan empat kilogram gula pasir.

Komis D DPRD Kota Yogyakarta menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan

program BPNT sebagai pengganti bantuan beras miskin (raskin) di Kota Yogyakarta. Evaluasi menyeluruh mulai dari validasi data, distribusi barang kebutuhan, dan kualitas barang.

"Evaluasi itu juga akan melibatkan Dinas Sosial, Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyedia barang kebutuhan pokok dan bank terkait yang mendistribusikan kartu elektronik untuk mengambil bantuan," ulas Ketua Komisi D, Agung Damar Kusumandaru.

Pihaknya mengaku telah menerima beragam aduan terkait dengan penyaluran bantuan pengganti raskin di Kota Yogyakarta ini. Kalangan legislatif pun meminta agar komoditas barang pokok yang merupakan bantuan untuk warga tak mampu itu benar-benar harus disalurkan tepat waktu dan kualitasnya dijaga.

Agung Damar menjelaskan, selain keluhan kualitas barang, pihaknya menerima keluhan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima bantuan raskin, tapi seka-

rang tidak menerima BPNT. Pihaknya pun akan meminta klarifikasi terkait validasi data penerima bantuan.

Validasi data penerima BPNT, kata dia, seharusnya Dinas Sosial sudah terbiasa, karena sudah sesuai ketugasannya. Apalagi selama ini pedataan warga miskin tingkat kota juga ditangani. Jika data tidak valid, lanjutnya, jumlah penyaluran bantuan bisa tidak sesuai.

Data ini juga berkaitan dengan kelancaran distribusi barang dari Bulog kepada penyalur. Sehingga, pihaknya berharap persoalan validasi data penyaluran bantuan terlambat dan dampaknya dirasakan benar oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kami juga mempertanyakan pengontrolan kualitas dari pemasok barang, terkait barang yang rusak kemasan dan kualitasnya kurang baik. Kami minta pemasok barang kebutuhan agar tidak menyalurkan barang kebutuhan yang rusak atau cacat kemasannya," ujarnya. (tim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005